



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS  
KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	Geber BUMN dan SP Perum Bulog
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 20 Mei 2015
Waktu	:	14.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri M.Sc/Wakil Ketua Komisi
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Set. Komisi IX DPR RI
Acara	:	Menindaklanjuti hasil pertemuan GEBER BUMN dengan Pimpinan DPR RI tanggal 19 Mei 2015
Anggota Hadir	:	29 dari 50 Anggota

**PIMPINAN**

1. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. Pol (FPD)
2. H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc (F-PG)
3. PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si (F-GERINDRA)
4. H. ASMAN ABNUR, SE., M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. ERMALENA MHS (F-PPP)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM.
7. Ir. KETUT SUSTIAWAN
8. dr. RIBKA TJIPTANING

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)**

9. Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.
10. Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si.
11. Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

12. Dr. H. SUIR SYAM, M. Kes.
13. Hj. SRI WULAN, SE.
14. ROBERTH ROUW

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

15. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
16. SITI MUFATTAHAH, Psi.
17. Drs. AYUB KHAN
18. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

19. Ir. H. A. RISKI SADIG
20. Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

21. Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

22. ANSORY SIREGAR, Lc.
23. Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt
24. H. HAMID NOOR YASIN, MM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

25. H. MUHAMMAD IQBAL, SE., M.Com
26. Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

27. Ir. ALI MAHIR, MM.
28. AMELIA ANGGRAINI

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

29. Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA

**JALANNYA RAPAT :**

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14:15 WIB)**

**KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc/ F-PG):**

Anggota Komisi baru saja selesai Rapat Paripurna, jadi mungkin masih sedang sholat atau makan siang segala macam, sehingga yang hadir belum begitu banyak, tapi seperti biasa RDPU tidak membutuhkan kourum, sehingga acara ini bisa kita lanjutkan.

**Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,**

Pada saat ini Komisi IX sebenarnya sedang mempersiapkan sebuah perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Jadi fokusnya kepada luar negeri, tapi Komisi IX tentu saja galau bahwa bukan saja di luar negeri, tapi masalah-masalah tenaga kerja di dalam negeri juga cukup banyak, tidak hanya di swasta tapi lebih-lebih di BUMN ya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dikuasai oleh negara, pemerintah tapi masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan kita di Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Oleh karena itu, kami dari Komisi IX tentu berkewajiban untuk mendengarkan, menampung, sekaligus nanti memperjuangkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada. Tentu saja pendekatan kami adalah sesuai dengan fungsi dewan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang merasa dirugikan baik oleh perusahaan maupun yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan negara.

Oleh karena itu, saya untuk mempersingkat waktu saya persilakan juru bicara dari Gerakan Bersama BUMN untuk menyampaikan masalah-masalah yang perlu didengarkan oleh Komisi IX, mungkin diawali dengan perkenalan, lalu langsung kepada inti masalah. Kami persilakan.

**GEBER BUMN:**

Baik, terima kasih Pak Pimpinan Komisi IX.

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah SWT., pada siang hari ini kita bisa bertemu.

## **Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi IX dan juga Anggota Komisi IX.**

Nama saya Yudi Winarno, saya sebagai salah satu Pimpinan dari Gerakan Bersama Serikat Pekerja, Gerakan Bersama Pekerja *outsourcing* di perusahaan-perusahaan BUMN dan sebelah saya ini adalah Pak Agus, kemudian ada Pak Mas'ud, adalah beberapa Pimpinan yang kami daftarkan nanti akan mewakili teman-teman menyampaikan maksud dan tujuan kami ke sini.

Sebenarnya unsur BUMN yang kami wakili ada 21, tapi yang bisa hadir sebagaimana yang saya tulis tadi, karena kita bergantian kemarin kita sudah diterima oleh Pimpinan DPR RI, sebagian yang tidak hadir hari ini kemarin hadir dan yang kemarin tidak hadir hari ini hadir, karena keterbatasan kami.

Kembali ke masalah apa yang perlu kita sampaikan, bahwasanya persoalan *outsourcing* BUMN atau pekerja-pekerja *outsourcing* di perusahaan BUMN ini sudah lama ya, bahkan sebelum Anggota atau Anggota Dewan periode 2009-2014 itu sudah intens untuk menangani permasalahan ini sampai dikeluarkannya sampai dibentuknya Panja khusus OS BUMN dan akhirnya dikeluarkannya rekomendasi Panja OS BUMN yang ditangani oleh Wakil Ketua DPR RI pada waktu itu adalah Bapak Taufik.

Nah itu adalah momen-momen yang bersejarah ya kira-kira 2 tahun yang lalu ya dan menggembirakan bagi kami semua para pekerja OS atau *outsourcing* di perusahaan BUMN ini, karena kita sangat membayangkan pada waktu itu itulah hari kemerdekaan kami. Di mana kami yang selama ini bekerja dengan status *outsourcing* itu merasa seperti bekerja tidak sebagaimana layaknya buruh-buruh yang hidup di negara yang sejahtera ini, hidup di negara yang kaya raya ini, tetapi yang kami rasakan bekerja sebagai *outsourcing* adalah kami seperti tidak punya hak untuk merdeka menentukan nasib kami sendiri untuk menjadi buruh yang sejahtera dengan penghasilan atau upah yang layak, bahkan untuk diri kami sendiri tidak cukup apalagi untuk keluarga kami, nah itulah.

Oh ya ini ada salah satu Pimpinan kami Pak, Ahmad Ismail, kebetulan masih ditahan karena teman-teman Pamdal, minta tolong dibantu bisa masuk, ya sama beberapa lagi ya.

Terima kasih Pak.

Jadi itu apa yang kami rasakan pada waktu kami dikeluarkannya atau ditandatanganinya rekomendasi Panja OS BUMN yang ada 12 poin di dalamnya itu ditujukan untuk pemerintah dalam hal ini adalah Meneg BUMN dan Menaker untuk menjalankannya. Sangat menggembirakan kami, tetapi ternyata itu hanya angin surga sampai hari ini pun tidak ada satu pun yang dijalankan dari 12 poin itu, bahkan dari masing-masing perusahaan BUMN itu melakukan manuver-manuver atau kebijakan-kebijakan sendiri ya, tidak ada satu pun padahal di rekomendasi itu ditekankan harus mengangkat seluruh pekerja *outsourcing* untuk menjadi pegawai tetap tanpa syarat, terus tidak boleh melakukan PHK, tapi dua ini justru dibalik, tidak ada pengangkatan, yang ada adalah PHK. Nah ini persoalan bagi kami ya sampai hari ini di Bekasi, Jakarta dan di seluruh BUMN-BUMN seluruh Indonesia yang berafiliasi terhadap gerakan bersama ini, Anggotanya mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak ada yang diangkat menjadi pegawai tetap di BUMN. Kalau

pun ada itu hanya 1-2 orang dan itu pun melalui persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, bahkan usia pun dipertimbangkan.

Nah ironis ini memang padahal mereka itu sudah bekerja lama ya, ada yang sampai 40 tahun, tetapi mereka bisa di-PHK begitu saja tanpa dianggap sebagai pekerja yang berjasa terhadap mereka. Padahal mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan negara, tapi mereka tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang layak dari negara.

Itulah persoalan-persoalan kami sampai hari ini pun masih terjadi PHK-PHK seperti itu dan tidak ada pengangkatan dari pekerja-pekerja OS itu menjadi pegawai tetap dari pekerjaan... Memang banyak alasan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan itu, tapi sebenarnya alasan-alasan itu adalah yang dibuat-buat ya, sehingga mereka punya keinginan untuk tidak melaksanakan rekomendasi itu menjadikan alasan-alasan itu supaya mereka tidak melaksanakan.

Jadi itulah persoalan kami, maka dari itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman Pimpinan yang lain kira-kira apa yang kami harapkan di sini adalah pada intinya dan prinsipnya adalah bagaimana Komisi IX ini kembali berupaya untuk melaksanakan atau mendesak pemerintah atau menekan pemerintah atau memerintahkan pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN dan Nakertrans atau Menaker untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibuat. Ini adalah salah satu fungsi dari DPR RI sebagai pengawas ya dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

Jadi itu secara singkat yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka pertemuan kali ini, dan selanjutnya saya persilakan kepada rekan kami.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar ya, ini dari SP Bulog ya sudah datang, juru bicaranya sudah siap ya, habis ini nanti dari SP Perum Bulog ya, silakan.

#### **PEGAWAI PT. PGN:**

Baik.

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

#### **Pimpinan Komisi IX dan Anggota yang kami hormati.**

Pertama-tama, kita bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya di hari Kebangkitan Nasional ini kita bisa silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa output yang menggembirakan rakyat Indonesia dengan semangat kebangkitan nasional.

Sedikit refleksi buat perjalanan Geber Pak. Geber ini. Oh nama saya Mastut Ibnu Rasyid, dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dan Anggota kami ada di PLN dan masuk dalam... BUMN.

Sedikit refleksi saja buat diketahui kita semua. Di zaman DPR RI kemarin, kita hampir 20 kali Rapat Kerja Pak dengan mendatangkan Menteri BUMN, seluruh Direksi BUMN, sudah ada kesepakatan-kesepakatan di sini, sampai-sampai Pimpinan DPR RI periode kemarin itu menjemput Menteri BUMN dengan naik ojek Pak sampai segitunya. Kalau aksi hampir ratusan kali kami sudah aksi, baik di Gedung dari pada maupun di kantor-kantor partai kita aksi, itu sudah kita lakukan dan menghasilkan sebuah hasil yang sangat menggembirakan ketika itu menurut kami adalah Panja Outsourcing BUMN dengan 3 poin penting yang dijelaskan oleh kawan tadi.

Pertama, bahwa hasil Panja ini bukan hanya kerja Panja ya, tapi ada Satgas. Satgas itu juga terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN bersama-sama dan melahirkan sebuah Panja, yang intinya bahwa *outsourcing* dibentuk menyalahi undang-undang, Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, maka konsekuensinya adalah seluruh *outsourcing* BUMN diangkat menjadi karyawan tetap, itu perintah Panja Pak. Yang kedua, kawan-kawan kami yang 2.977 yang sudah di-PHK itu diangkat dipekerjakan kembali dan ketiga hak-hak normatif selama mereka tidak di-PHK itu mesti dibayar. Itu perintah DPR RI Pak, lewat tandatangannya waktu itu Wakil Ketua Pak Taufik dari PAN ya kirim surat kepada Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan, Pak Dahlan Iskan sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direksi BUMN, tetapi surat edaran juga dianggap sampah sama direksi BUMN. Jadi tidak ada pelaksanaan.

Juga waktu itu hampir terjadi interpelasi Pak ketika itu di paripurnakan oleh Bapak-Bapak Anggota Dewan periode kemarin pasti tahu, salah satu Anggota Dewan yang mendukung kami Pak... waktu itu mengusulkan interpelasi, tapi karena dari Demokrat menjamin bahwa mereka bisa menghadirkan Dahlan Iskan, maka itu tidak terjadi. Jadi sederhananya sebenarnya tugas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini lebih ringan dibandingkan DPR RI kemarin.

Berikutnya bahwa kita RDPU di sini dengan Anggota DPR yang baru tanggal 10 Desember, itu sudah ada kesepakatan bahwa Komisi IX akan mengundang Komisi VI, Menteri BUMN, Menaker untuk melakukan rapat gabungan waktu itu dan ditetapkan tanggal 2 Februari Pak, tapi itu tidak ada terjadi karena Komisi VI tidak berkesempatan waktu itu. Kemudian tanggal 10 bulan diundur tanggal 10 ya tanggal 2 tidak jadi diundur tanggal 22 April 2015 tapi juga tidak jadi Pak.

Nah harapan kami bahwa pada kesempatan ini kita bisa membuat sebuah kesepakatan, kita bisa pastikan, DPR bisa pastikan, terutama Komisi IX bisa mendatangkan Menteri BUMN dengan seluruh direksi yang ada di BUMN dan Komisi VI dan Menteri Tenaga Kerja supaya persoalan ini tuntas, karena ini ratusan ribu kawan-kawan kami Pak ini sudah terlunta-lunta, ada yang di-PHK 2 tahun dan lainnya.

Ini ada pesan ini Pak, oh. Bapak-Bapak mohon bantuannya lagi ini koordinator Geber BUMN Saudara Ais masih ditahan di luar ini Pak di Nusantara I di pintu belakang Nusantara I. Kalau tolong Pak Pamdal bisa dibantu untuk dimasukkan.

Ada sedikit ini Pak, sebenarnya begini di Satgas itu sudah punya kesimpulan di Satgas itu ya. Satgas itu terdiri dari unsurnya Menteri BUMN dan Menteri Tenaga

Kerja, itu SK-nya Menteri BUMN untuk melakukan pelaksanaan dari hasil Panja Outsourcing, tapi sampai sekarang hasil dari Satgas itu juga kita tidak tahu. Problemnya Direksi BUMN ini seperti tidak bisa tersentuh. Dia hidup di luar republik Indonesia. Itu problemnya, karena Menteri Tenaga Kerja tidak dihargai, yang kalau kami mau jujur, justru Direksi BUMN itu yang *outsourcing* Pak, dia kan dikontrak 5 tahun tergantung siapa menterinya. Kalau menterinya senang diangkat, kalau tidak ya tidak dipakai.

Kalau kawan-kawan ini Pak, skill tenaga ahli semua. Dia membesarkan BUMN, dia berkorban dengan tenaga dan keahliannya, direksi yang gajinya ratusan juta, kawan-kawan kami diperlakukan seperti barang dan jasa Pak ditenderkan. Manusia ini ditenderkan antara vendor dengan perusahaan BUMN, harganya antara kesepakatan. Hak hidupnya sudah dihabisin. Di zaman kemerdekaan seperti ini di perusahaan negara masih melakukan sistem perbudakan. Siapa yang berserikat dihabisin dan itu kawan-kawan di... tidak lagi bekerja Pak karena...

Secara legalitas hukum sudah clear Pak, Menaker sudah mengeluarkan berita penetapan bahwa *outsourcing* itu menyalahi undang-undang, jadi perintah ini harus diangkat. Komisi IX sudah mengeluarkan hasil Panja-nya. Jamdatun dari Kejaksaan sudah mengeluarkan LO-nya Pak, apalagi yang kurang? Maka kami sangat berharap ada sebuah langkah yang luar biasa dari Komisi IX untuk melakukan ini, kalau tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa Pak. Bayangkan Pak ini Saudara saya ini Pak Sahrir ini sudah mau bakar diri di Istana Presiden hari ini sebenarnya, tapi kita masih tidak mau, saking stresnya, dari PLN ya pencatat meter 30-an tahun bekerja di sana Pak. Dia sudah buat surat wasiatnya, bayangkan ini di tingkat Jakarta dan sekitarnya Pak, bagaimana di daerah-daerah?

Jadi tolong sekali lagi Pak kepada Pimpinan Komisi IX lewat kapasitas dan otoritasnya itu panggil paksa menteri ininya dan itu boleh kita lakukan itu DPR RI boleh. Dahlan Iskan kita paksakan dia naik di mobil komando untuk menyatakan sikapnya waktu itu di depan istana Pak. Kalau dulu orang tua kita dulu yang mendirikan Budi Utomo untuk memperjuangkan itu, sementara kita ini apa Pak. Jadi tolong kami minta benar ini Pak kepada Komisi IX ini agak sedikit ekstralah. Kalau kaya mau RDPU kita demo dulu RDPU mau ini dulu kita aksi dulu wah luar biasa. Nah ini yang kami tidak tahu lagi apakah ini kita mau pakai cara-cara kekerasan atau cara-cara yang lain kita tidak tahu kalau memang hari ini 2 kali di Rapat Kerja tidak ada hasilnya, ke depannya kita tidak tahu.

Saya pikir begitu Pak, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain.  
Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Masih ada apa sudah cukup?  
Ya singkat.

## **PEGAWAI PT. PGN:**

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Nama saya Agus Hadi Prabowo atau biasa dipanggil Abah Agus. Saya *outsourcing* di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

**Bapak dan Ibu yang saya hormati,**

Saya coba menambahkan apa yang telah disampaikan oleh para Pimpinan. Di sini saya coba memandang dari saya sebagai pekerja *outsourcing*. Melihat bagaimana proses permasalahan status pekerja *outsourcing* ini berjalan. Kami pekerja *outsourcing* bertahun-tahun bekerja di perusahaan BUMN yang kemudian kami mendapatkan setiap upaya kami untuk mempertanyakan status kami biasanya dijawab dengan *take it or leave it*, padahal kalau kami benar-benar *take it* waktu itu kami *leave it* kami tinggalkan BUMN, PGN tidak bisa jalan, saya yang bebasin pipa gas dari Gresik sampai Banten. Teman-teman *outsourcing* yang bebaskan lahan, teman-teman *outsourcing* pembebasan tanah yang membebaskan lahan, teman-teman *outsourcing* konstruksi yang menandatangani setiap titik las pipa. Kalau PGN menggunakan konsultan untuk menentukan standar kerja, kemudian kontraktor mengelas, maka orang PGN yang menandatangani apakah las ini lolos kualifikasi adalah *outsourcing*. Tetapi apa yang terjadi, ketika kemudian keluar nota pemeriksaan atau pertama kali ketika kami mempertanyakan mungkin juga teman-teman pekerja *outsourcing* lain, kami mulai mendapatkan tekanan baik itu dianggap SP *outsourcing* tidak legal akan diadukan kepada Kepolisian atau kemudian kami dianggap tidak *qualified*, maka kalau kami buat laporan sebenarnya PGN itu pipa gasnya tidak ada yang *qualified* karena yang tanda tangan itu adalah *outsourcing*.

Kemudian upaya-upaya dilakukan mulai pengabaian, pengabaian terhadap upaya kami mempertanyakan status sehingga berlarut-larut. Ketika kemudian akhirnya kami mendapatkan dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui mediasi atau pun nota pemeriksaan, perusahaan BUMN ini saya lihat mulai mencoba memutarbalikan fakta. Yang sederhana saja mereka mengatakan bahwa *outsourcing* itu ada undang-undangnya, boleh dong kamu pakai, ini bukan soal dipakai atau tidak, ini adalah adanya undang-undang ini memang ada, tapi ini ada pelanggaran, bekerja lebih dari 2 tahun sampai 10 tahun, puluhan tahun dengan kontrak berulang-ulang. Saya 10 tahun di PGN dengan kontrak sebanyak mungkin hampir 30 kali itu jelas melanggar aturan, tetapi setiap saya mendengar penjelasan dari kementerian itu mereka selalu menyampaikan bahwa BUMN ini mengatakan boleh dong pakai, memang boleh untuk yang tertentu-tertentu mungkin boleh di luar dari etika sebagai bangsa Indonesia bahwa seharusnya tidak ada lagi perbudakan modern, tapi ini adalah pelanggaran.

Yang kedua, adalah upaya-upaya untuk memperlambat urusan ini, sehingga akhirnya adalah teman-teman *outsourcing* habis kontraklah, dicari-cari kesalahannya, tidak diberi pekerjaan, tidak diberi lembur, akhirnya secara finansial tidak lagi mampu menghidupi keluarga. Kemudian ketika kontrak habis



dengan santainya memberhentikan, dengan alasan kami tidak punya hubungan kerja dengan pegawai outsourcing, mereka hubungannya dengan tender, tetapi hubungan itu kan terjadi secara serta merta dengan keluar kata demi hukum berdasarkan pasal-pasal di Undang-undang Nomor 13 beralih dari tender kepada pemberi kerja atau BUMN, tapi ini diputar balik terus oleh BUMN.

Nah akhirnya kemudian dengan santainya seperti misalnya di PGN di kementerian pada bulan Januari 2014 karena berjanji akan sudah mempunyai formula, kita akan perlu waktu tapi masalahnya kontrak kami tinggal 4 bulan bagaimana. Mereka mengatakan kami jamin keberlangsungan pekerjaannya, bikin surat di notulensi ditandatangani bersama, tetapi kemudian bulan Juni teman-teman *outsourcing* di PGN itu diberhentikan, bahkan khusus untuk yang berserikat di *outsourcing* seperti saya kalau saya berdiri di pintu gerbang PGN 10 *security* akan berlari dari gedung menghalangi saya untuk masuk.

Nah jadi di sini saya sekarang bingung mau apalagi gitu. Dari mulai tidak diakui, kemudian mereka memutarbalikan fakta, mereka bilang mau tetap kasih pekerjaan, tapi kemudian di-PHK, nota pemeriksaan mereka bilang hanya anjuran, tidak perlu ditaati dan kemudian upaya-upaya untuk memperlambat. Oke saya kasih formulanya, tapi tunggu ya begitu 2 bulan batal, dipanggil ke BUMN wah ini SP Gas.

#### **KETUA RAPAT:**

Dipersingkat Pak, biar ada waktu untuk bicara Anggota nanti.

#### **PEGAWAI PT. PGN:**

Ya, jadi gitu Pak. Di sini saya coba menyampaikan bahwa ada upaya seperti kata Bang... bahwa direksi ini sepertinya bukan tinggal di Indonesia dan berani menganggangi hukum undang-undang serta memutarbalikan fakta. Termasuk mungkin kalau di Komisi kemarin ada legal opinion, Komisi IX memanggil Jaksa Agung ya, Jamdatun, kemudian mereka bilang Jamdatun mendukung kami, tapi mereka tidak pernah mau menunjukkan apa itu legal opinion yang dikeluarkan Jamdatun itu, tapi kalau kita baca dan saya pernah baca karena di PGN itu hampir semua divisi ada outsourcingnya... itu mendukung kami berdasarkan nota pemeriksaan harusnya diangkat menjadi pegawai tetap di BUMN, walaupun memang ada materi yang bisa masih menjadi objek yang disengketakan, tapi PHI (Pengadilan Hukum Industri) tidak lagi bisa memperadilkan tentang materi, PHI hanya bisa memperadilkan bagaimana cara pelaksanaan dari pengangkatan atau materi dari nota pemeriksaan itu.

Demikian Bapak dan Ibu, kami harapkan semoga Komisi IX kembali memasatkan dilaksanakannya rekomendasi Panja beserta turunan-turunannya dan dengan lebih tegas, baik itu melalui dilaksanakannya Rakergab yang kami harapkan bisa terlaksana pada sidang saat ini, karena kami sudah kehabisan logistik dan mungkin juga dengan memberikan teguran langsung atau pun surat perintah langsung kepada pemerintah untuk menjalankan apa yang seharusnya kami dapatkan untuk hak-hak kami untuk satu pekerjaan.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih dari Geber Buruh pekerja di BUMN.

**GEBER BUMN:**

Mohon maaf ini ada satu lagi mungkin tambahan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya kira cukup ya.

Saya kira bahasanya sama semua, intinya bagaimana rekomendasi ini berjalan ya, tidak usah variasinya macam-macam.

**GEBER BUMN:**

Satu lagi Pak maaf Pak, ada Undang-undang ASN yang baru dikeluarkan nah itu.

**KETUA RAPAT:**

Itu menjadi perhatian kami juga.

**GEBER BUMN:**

Ini saya juga heran kenapa dikeluarkan seperti itu gitu Pak, seakan-akan, bukan seakan-akan, memang akhirnya melegalkan *outsourcing* itu.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Sekarang kami persilakan dari Serikat Pekerja Bulog.

**SP PERUM BULOG:**

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Minta maaf mungkin untuk Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IX serta kawan-kawan dari DPR suaranya agak serak, karena sementara saat kami sudah lakukan pendudukan di Kantor Perum Bulog.

Kami terutama saya mungkin yang pertama, nama saya Abdila, dari Serikat Pekerja... Perum Bulog. Kami sudah 3 hari ini melakukan aksi menginap di Kantor Perum Bulog Jalan Gatot Subroto. Kami berpusat di Sulawesi Selatan. Jadi Serikat Pekerja... Perum Bulog berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Kami datang ke sini tiada lain untuk menuntut hak-hak kami yang selama ini dirampas oleh direksi, dengan santai setiap kami mempertanyakan mereka dengan santai menjawab silakan kalian menuntut itu haknya kalian, tapi kami mempunyai hak juga.

Sementara Bapak-Bapak perlu ketahui dengan Ibu-Ibu sekalian selama 10 tahun kami mengabdikan di Perum Bulog yang katanya kami adalah ujung tombak, kami adalah pemeriksa kualitas sekaligus... kualitas dan perawat semua barang-barang yang masuk di dalam Perum Bulog. Apakah itu beras atau gabah kami yang memeriksa dan kami yang rawat. Itu kami lakukan 10 tahun.

Yang pertama ketika keluar aturan... Direksi yang pertama tertulis di situ kami adalah *outsourcing* tapi ketika keluar kita pertanyakan hal ini ternyata mereka menyangkal itu. Mereka mengatakan kami adalah... unit bisnis dari Perum Bulog. Jadi kami mempertanyakan. Kalau memang kami unit bisnis, berarti kami bagian dari Perum Bulog. Mereka menjawab bukan, kalian hanya unit bisnis, karena kalian mempunyai kontrak dengan Perum Bulog. Iya betul kami mempunyai kontrak dengan Perum Bulog sejak Tahun 2005 sampai 2012, tapi itu pun batal demi hukum karena kami menganggap itu kontrak itu hanya dibuat satu rangkap.

Jadi sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2012, kami tidak pernah mendapatkan salinan atau arsip untuk kami pegang dari kontrak itu, tapi mereka menganggap itu sah. Makanya kami nekad datang ke Jakarta ini untuk melakukan aksi. Kebetulan semalam kita mendapat informasi tentang adanya rapat di DPR RI ini dengan Geber, makanya kami mencari jalan untuk bisa juga menginjak gedung rakyat ini untuk menyampaikan kami punya masalah.

Kami 10 tahun Pak cuma digaji 35 Ribu per bulan sampai 800 Ribu tanpa jaminan yang lain-lain, tanpa tunjangan apa-apa. Kami dikirim ke daerah, sampai di ujung-ujung provinsi tanpa ada jaminan apa-apa. Tidak ada pondokan, tidak ada makan, seperti kalau bahasa di kampung itu namanya... Pak kita ini. Artinya kerbau yang kalau mau dipakai ya dipakai, kalau tidak dilepas saja itu nyari makan sendiri rumput.

Ini mungkin saya juga bersepakat dengan kawan-kawan dari Geber, sebaiknya ada langkah-langkah yang sedikit keras atau sangat keras yang perlu dilakukan oleh Komisi IX untuk menghadirkan Direksi Perum Bulog beserta dengan Menteri BUMN maupun Menteri Tenaga Kerja untuk duduk bersama kami di sini atau untuk duduk bersama kita-kita yang ada di sini untuk membahas. Artinya supaya kita berharap seperti itu supaya nantinya informasi tidak terpotong-potong Pak supaya bisa dipertemukan yang mana yang sebenarnya. Mungkin untuk sementara Pak itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup satu ya.

Intinya dari Perum Bulog adalah ingin diakui sebagai unit atau bagian dari Bulog, bukan sebagai *outsourcing* gitu ya?

**SP PERUM BULOG:**

Ya Pak, jadi kami ingin menuntut sekarang ini kami menuntut untuk PKWTT Pak, karena mereka selama ini PKWPT pun mereka tidak anggap Pak. Jadi tuntutan kami saat ini adalah PKWTT.

**KETUA RAPAT:**

Apa itu?

**SP PERUM BULOG:**

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau karyawan tetap Perum Bulog Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Bapak-bapak sekalian dari Geber Buruh dan juga dari SP Perum Bulog.

Saya kira sekarang kesempatan bagi Anggota Komisi IX untuk mendalami masalah-masalah yang sudah dikemukakan.

Perlu saya sampaikan bahwa Komisi IX periode yang lalu sudah membentuk Panja dan Panja itu sudah dilaporkan tanggal 22 Oktober 2013, ada 12 poin dari hasil Panja tersebut menurut Geber tadi tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Saya bacakan saja untuk menambah informasi kita semua.

Pertama, Menteri BUMN RI wajib melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI sesuai komitmen Menteri BUMN RI yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kementerian BUMN RI tanggal 9 September 2013.

Dua, hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh *outsourcing* di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

Tiga, setiap perusahaan BUMN dilarang keras melakukan pelanggaran, penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN, termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24, Pasal 39 Undang-undang 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 dan seterusnya.

Empat, tidak boleh ada PHK dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja buruh baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT. Tadi itu ya.

Lima, terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum yang tetap inkrah harus segera membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai Pasal 156 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam hal ada

perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di-PHK tersebut.

Enam, pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing, dirumahkan harus kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN di seluruh Indonesia. Dalam hal pekerja setelah memenuhi kriteria sesuai Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka harus segera diangkat menjadi pekerja tetap atau PKWTT dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN.

Tujuh, hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, wajib dibayar oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan, hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Delapan, seluruh hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 wajib diberikan oleh perusahaan BUMN di seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sembilan, dalam hal penyelesaian permasalahan perburuhan di semua tingkatan proses hukum, direksi di perusahaan BUMN dilarang menggunakan anggaran perusahaan.

Sepuluh, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepolisian RI agar memproses hukum dan menindak tegas tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

Sebelas, rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja terhitung sejak rekomendasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi IX DPR RI tanggal 22 Oktober 2013 dan bila direksi perusahaan BUMN ini mengabaikan rekomendasi Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk memberhentikan Direksi BUMN yang bersangkutan.

Dua belas, untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh pihak Kementerian BUMN RI, Panja Outsourcing BUMN merekomendasikan kepada Komisi IX DPR RI untuk membentuk satuan tugas (Satgas) *Outsourcing* BUMN bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta melibatkan perwakilan Serikat Pekerja Outsourcing.

Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang Anggota Komisi IX yang baru masuk tahun ini, ya itulah kira-kira rekomendasi yang lalu. Saya kira isinya masih valid, masih kuat, persoalannya sekarang adalah apakah pemerintahan sekarang menteri sekarang bisa melaksanakan ini atau tidak, tentu Komisi IX berkewajiban untuk memperkuat ini kembali agar ini bisa dijalankan oleh pemerintah.

Oleh karena itu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pertemuan Pimpinan kemarin, direncanakan dalam waktu singkat ini ada rapat gabungan antara Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja dan mungkin nanti juga dengan Bulog ya juga Bulog akan kita undang supaya semua masalah-masalah terkait dengan *outsourcing* ini bisa dituntaskan.

Saya kira itu hal-hal yang bisa kita tangkap dari perkembangan pembahasan masalah ini. Sekarang kami persilakan kepada Bapak dan Ibu.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Ansory silakan.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Salam sejahtera buat kita semuanya.**

**Hormat saya kepada Pimpinan khususnya juga teman-teman kita semuanya.**

**Pimpinan yang terhormat.**

Apa yang sudah dibacakan tadi saya termasuk Panja di situ, bukan saja termasuk Anggota Panja, tapi termasuk merancang yang ditulis 12 itu, jadi perumus itu gitu dan itu untuk merumuskan itu Pimpinan itu waktu itu perlu gila-gila sedikit, karena harus melawan undang-undang, karena putusan yang tertulis di situ harus *outsourcing* harus dihapus ya, karena *outsourcing* itu Pimpinan adalah kebiadaban, kebinatangan, dan juga kedzaliman gitu dan dia sama dengan apa namanya kalau masa Jepang itu romusa, saja kejarnya Pimpinan, sama sadisnya *outsourcing* ini dan ini perbudakan modern.

Ini kita cuma saya juga bingung gitu, kenapa bingung, sudah kita gila-gila sedikit pada waktu itu pemerintah biasa-biasa saja gitu. Nah kalau perlu sekarang Anggota Komisi IX yang sekarang harus gila beneran gitu Pimpinan. Jadi gila benerannya bagaimana, stop Rapat Kerja dengan Menaker ya sampai dihapus *outsourcing* ini mulai sekarang itu usul saya. Kalau perlu kita tandatangani sekarang gitu dan kita tidak akan membahas anggaran-anggaran Kemenaker itu gitu, nanti akan bersambut kepada BUMN begitu. Ini gila beneran Pimpinan, karena kalau tidak begini tidak akan, tetap saja begini terus-terusan. Sudah kita alami seperti ini kok sudah beberapa tahun-tahun setiap tahun begini, tetap saja dilakukan itu begitu dan itu kebiadaban tadi Pimpinan itu sudah lingkaran setan. Kenapa saya sebut lingkaran setan, pengusaha ikut bermain, pemerintah ikut bermain, bank ikut bermain, semuanya ikut bermain, pengadilan ikut bermain.

Saya kasih contoh Pimpinan salah satu, ada perusahaan besar... itu dia pekerjanya kalau tidak salah waktu itu 9 Ribu di-PHK semuanya Pimpinan karena *outsourcing*. Lucunya begitu di-PHK detik itu juga perusahaannya itu ganti nama dan menerima pekerja baru hanya untuk biar tidak bayar pesanggon. Gila Pimpinan, ini sekali lagi gila. Itu lingkaran setan tadi itu Pimpinan.

Nah ini mereka banyak sebenarnya, malah kalau saya sebenarnya kepada tamu-tamu ini sudah demo besar-besaran saja, ini kebenaran kok ya, tidak apa-apa,

ini kebenaran kok. Kalau tidak bisa di-oke-kan tidak bisa disetujui apa lagi? Anak keluarga semuanya korban Pimpinan. Tenaga, pikiran semuanya gaji tadi sudah disebutkan tadi berapa tadi itu, pekerjaan-pekerjaan yang utama itu Pimpinan. Ya di samping saya usulkan Pimpinan, semua yang ada di rekomendasi harus kita saya usulkan lewat pribadi harus kita setuju tanpa tutup mata Pimpinan, tutup mata kita setuju apa yang ada dalam keputusan Panja Komisi IX yang kemarin itu. Mungkin kita tinggal menambah mau gila-gila sedikit atau gila-gila beneran gitu. Ya kalau tidak, tidak bisa ini kalau tidak bisa kita ini. Ya sekarang masih praktek-praktek outsourcing, pemerintah sekarang ini tidak ada lampu-lampu hijau untuk menghapus outsourcing, tidak ada. Harus kita suarakan sama-sama.

Saya itu saja Pimpinan pertama itu kita tutup mata kita setuju semuanya, kalau perlu kita tambah harus kita lebih tegas lagi dalam masalah *outsourcing* ini, apalagi ini BUMN Pimpinan. BUMN saja berani seperti ini apalagi perusahaan-perusahaan swasta Pimpinan. BUMN, perusahaan swasta lebih gila lagi. Itu sekedar terima kasih Pimpinan juga teman-teman atas usahanya semuanya, saya kira Bapak Dedi Yusuf, Pak Syamsul, juga Pimpinan-pimpinan yang lainnya saya kira ini semuanya juga darah keringat kami juga sama seperti juga daerah keringat para buruh pekerja sekalian.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Djoni, baru Pak Ali.

**F-HANURA (CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MMAR, MBA):**

Terima kasih Pimpinan dan rekan Komisi IX. Pengurus Geber BUMN serta SP Perum Bulog.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Saya Djoni Rolindrawan, Fraksi Partai Hanura, daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Jadi kalau dilihat tadi sudah 20 kali lebih RDPU ya dan Rapat Kerja juga ikut, kemudian sudah 100 kali lebih demo gitu kan. Jadi saya kira memang upayanya itu sudah luar biasa, tidak perlu kita membuat duplikasi saya kira dengan rekomendasi yang sudah ada, tinggal saja karena memang rekomendasi itu dibuat hampir peralihan ya masa peralihan DPR RI maupun pemerintah gitu ya. Jadi adalah layak saya kira untuk kita panggil dululah mereka, kita panggil dulu, tadi kan juga Pak Pimpinan sudah mengatakan sudah mengagendakan untuk memanggil akan mengadakan rapat bersama gitu ya, seperti itu saya kira kita panggil dulu bagaimana jangan-jangan menterinya juga belum pernah baca itu rekomendasi

walaupun sebagian Eselon I ada yang sudah berganti, tapi ada juga yang masih tetap, saya kira itu Pimpinan.

Terus juga tadi disebutkan bahwa menabrak undang-undang setengah gila katanya, mungkin kita sudah mulai berpikir bagaimana memperbaiki undang-undang yang sudah ada itu gitu. Saya kira itu, demikian.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

Pak Ali Taher.

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Saudara Pimpinan dan Anggota serta rekan-rekan saya sekalian yang berbahagia.**

Saya Muhamad Ali Taher Parasong, Dapil Banten III, Nomor A-495, asli Nusa Tenggara Timur, dari Fraksi PAN.

Saya kira dari 4 pembicara dari Geber, kemudian pekerja muslim, gas negara dan Bulog, telah mewakili pikiran kita semua. Bukan hanya pikiran, tetapi suasana emosional, suasana ya emosional seolah-olah empati, karena kami perasaan kami itu hadir bersama Saudara. Nah itu yang mendorong kami untuk berpendapat pada sore hari ini.

Saya seringkali mengatakan burung gereja saja itu mampu makan dan bertahan hidup selama dia hidup, apalagi manusia. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup. Nah oleh karena itu bagi saya tidak ada alternatif lain Pak Ketua, kecuali apa yang disampaikan Pak Ansory tadi itu menjadi rekomendasi kita pada hari ini, meskipun ada catatan-catatan penguatannya, penguatan itu yang mendorong supaya itu terjadi, supaya tidak boleh ada lagi politik pembiaran terhadap ketenagakerjaan kita.

Nah oleh karena itu upaya teman-teman dari SP ini menurut saya harus kita respon dengan tulus hati, tidak boleh pendekatan atau respon politis, tetapi respon yuridis. Politis pintu masuk, yuridis itu adalah memastikan itu supaya berjalan. Jadi saya itu tidak orang hukum, jadi saya paham betul bahwa respon politik dengan politik selesai, tetapi ketika respon politik kemudian menjadi respon hukum, maka memiliki nilai daya keputusan yang bisa mengikat kedua belah pihak.

Usul yang simpati dari Pak Ansory tadi bagus sekali, kalau perlu kita Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri, kalau Menteri tidak menyetujui kita tinggalkan ruang sidang itu sebagai protes mewakili kepentingan suara rakyat kita, karena bagi



saya suara rakyat itu suara Tuhan, tetapi jangan lupa bukan semata-mata... tetapi... suara Tuhan suara rakyat juga. Sekarang ini kan kita terima demokrasi sepenuhnya menjadi... suara rakyat suara Tuhan, saya tidak bisa begitu, dua-duanya... suara rakyat suara Tuhan dan suara Tuhan karena ini Pancasila ketuhanan yang maha Esa, maka...

Namun demikian Saudara-saudara sekalian apa yang sudah dibacakan Pak Ketua tadi Wakil Ketua tadi mengenai rumusan, itu secara mutatis mutandis artinya perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan penting yang sudah dirumuskan itu menjadi sesuatu yang perlu..., menurut saya rumusan tadi sudah sempurna, tinggal kita kuatkan lagi mana yang perlu kita kuatkan. Barangkali menguatkannya adalah merekomendasikan saja bahwa Komisi IX menguatkan kembali hasil Panja Tahun 2013 bersama dengan Menaker supaya itu dieksekusi dan dijalankan ya dan itu Komisi IX akan mengawal *day to day* akan mengawal itu supaya jangan sampai nanti ada korban berjatuhan terus menerus.

Coba saya bisa bayangkan tadi ada yang mau bakar diri itu haram hukumnya, tetapi perasaan emosional tanggung jawab sosialnya kita bisa paham. Nah oleh karena itu dalam perang itu dibolehkan kalau mempertahankan hak dan memperjuangkan keadilan. Perang itu muncul karena mempertahankan hak dan memperjuangkan kalau itu dibolehkan harus farduain sifatnya. Saya tidak propokasi, tapi itu dasar hukumnya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Pak Dede Macan, kalau tidak bisa berjalan bukan macan lagi ya, jadi harus sudah Dede Yusuf Macan, memang macan, wah macan tutul... kalau belau sangat konsen, jadi saya kira kita mendoronglah Pak Syamsul dan teman-teman sekalian, saya terharu sekali mendengar itu dan kita terus mengawal saya Ali Taher dari Fraksi PAN terus mendorong ini supaya terwujud dalam pengertian keputusan itu.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hamid Noor Yasin.

**F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, MM):**

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX,  
Rekan-rekan dari Geber BUMN, Pak Yudi Larno, Pak Masud, Abah Agus dan  
Mas Adila beserta seluruh pasukannya yang saya hormati.**

Persoalan *outsourcing* ini sudah lama berlarut-larut dan perjuangan kawan-kawan ini sudah luar biasa. Kalau tadi dipaparkan oleh Pak juru bicara kemudian resume yang disampaikan oleh Pak Syamsul tentang kerja-kerja DPR Komisi IX... 11 tahun lebih perjuangan, kemudian 20 kali RDPU kemudian sudah dibentuk Panja kemudian Satgas ini upaya yang luar biasa, tetapi perbudakan gaya baru ternyata masih dijalankan dan serangkaian derita yang diungkapkan oleh kawan-kawan luar biasa membuat hati kita trenyuh dan miris. Oleh karena itu saya senada dengan teman-teman yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya bahwa persoalan ini harus segera kita selesaikan. Persoalan ini harus segera kita *clear*-kan.

Ada beberapa persoalan yang mandek kenapa ketika kita sudah merekomendasikan kemarin pada saat rapat yang lalu, itu agar kita usulkan untuk rapat gabungan Komisi IX dan Komisi VI, kemudian dengan mengundang Kemenaker, kemudian Kementerian BUMN, kemudian Geber BUMN, itu sampai sekarang belum bisa terealisasi. Nah ini harus kita cari di mana titik persoalannya, apakah karena Kementerian BUMN yang memang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan teman-teman ini atau mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja ini harus kita cari kita lacak, kita kawal, semuanya kita berjuang bersama-sama agar persoalan ini segera kita selesaikan. Ini menjadi... ini amanat kemudian tanggung jawab yang ada di pundak kita untuk membantu teman-teman Geber BUMN. Saya rasa kita sepakat kenapa agar persoalan ini bisa kita selesaikan.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Azhar, setelah itu Pak Ali Mahir.

**F-PG (Ir. AZHAR ROMLI, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Ketua, para Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,  
Para tamu kita, hadirin undangan yang berbahagia.**

Pertama, saya ingin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu bersama dari tamu kita, saya ini baru masuk di Komisi IX ini pindah hijrah dari pada Komisi V... Pimpinan dan sekarang kita berada di sini dan menerima Pansus.

Saya ingin mulai teringat karena dulu sebelum di Komisi V pernah juga di Komisi VI, menyangkut masalah kehidupan kawan-kawan kita pekerja di BUMN ini memang rentan. Kita pernah berhadapan dengan pegawai Nortanio yang begitu banyak juga menuntut hak dulunya, kemudian juga masalah PT. Timah, kemudian juga mengenai masalah itu bukan *outsourcing* saja, pegawai tapi diberhentikan dengan... sekarang... Komisi IX sesuai dengan Tupoksi.

Saya sedikit saja Bapak, tadi sudah banyak teman-teman kita berbicara dan juga disampaikan oleh Pimpinan ada rekomendasi Panja kita yang menurut saya

secara politik itu cukup kuat, tapi kalau kita lihat akar permasalahan dari persoalan *outsourcing* ini, sebenarnya kalau di tingkat aparatur negara, pemerintah, aparatur sipil negara itu kita saya juga lama di Komisi II itu membuat Undang-undang aparatur sipil negara namanya. Saya tidak tahu pemerintah melihat ataukah bagaimana Komisi IX ini nanti menempatkan posisi *outsourcing* yang ada di BUMN ini, karena ini pemerintah juga saya melihat, karena mereka memang diatur oleh undang-undang tersendiri menyangkut kepegawaian, tidak sama dengan aparatur sipil negara, tapi apabila kita mengikuti landasan hukum yang perlu kita perkuat supaya pihak-pihak stakeholders yang berkepentingan baik menaker, BUMN maupun direksi-direksi itu bisa menjalankan tugas atau melaksanakan rekomendasi yang bersifat politis tadi. Landasan hukumnya harus diperkuat, karena secara undang-undang memang *outsourcing* itu diperbolehkan, tetapi di lain pihak kejadiannya begini kan.

Oleh karena itu saya ingin mencoba bisakah kita mencoba misalnya tadi waktu rapat koordinasi nanti beberapa menteri rekomendasikan kembali kita. Memang Undang-undang aparatur sipil negara itu misalnya bisa dipayungi sebagai turunan peraturan pemerintah terkait menyangkut tentang pegawai BUMN ini, supaya isi dari pada Undang-undang aparatur sipil negara itu kan ada dua, aparatur sipil negara satu yang bersifat PNS, satu yang bersifat P3K (Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja), tetapi perjanjian kerjanya bukan kaya seperti diberlakukan *outsourcing* ini, perbedaannya kalau di Undang-undang aparatur sipil negara itu cuma dia tidak dapat pensiun, tapi yang menyangkut mengenai masalah hak, kewajiban dia, bahkan fungsional tugas dia itu bahkan melebihi dari pada, karena diatur berdasarkan bobot, jenis pekerjaan yang dia lakukan itu.

Sehingga kalau ini saya pikir bisa dipakai Pak, misalnya Undang-undang aparatur sipil negara ini, tapi kita menghimbau kepada pemerintah payung hukumnya itu bisa diturunkan, karena di sana itu bersifat memang kepada aparatur, tapi karena mengemukakan adanya P3K, sebenarnya kita artikan P3K itu adalah juga *outsourcing* yang ada di tingkat swasta ataupun BUMN dan honorer yang ada di pegawai pemerintah itu. Oleh karena itu di P3K itu juga dia tidak menutup kemungkinan kalau suatu ketika pada tahap awal dia diangkat sebagai P3K, kalau suatu ketika dia ada uang atau penerimaan pegawai untuk tetap katakanlah PNS dia diberikan kesempatan. Nah ini juga hal yang sama saya pikir nanti bagaimana kita menempatkan walaupun payung hukumnya.

Saya melihat persoalan-persoalan yang menyangkut masalah *outsourcing* ini dan tenaga kerja ditelantarkan ini memang benar kalau kita cari seperti Pak Ali katakan tadi yuridis itu perlu kita cari dulu di mana lubang, supaya tindakan dari pada untuk mengeksekusi ini ada dilakukan oleh undang-undang itu, karena memang kalau kita lihat Pancasila sila kedua itu ya benar-benar memang kemanusiaan yang adil dan beradab itu kadangkala ya sudah tidak dilaksanakan, tadi ceritakan tadi selama berapa tahun cuma 35 Ribu dibiayakan sehari itu rasanya miris memang kalau kita dengar, kita di sini hari-hari habis di parkir saja mungkin lebih dari pada itu uang untuk ini.

Jadi memang ini semangat untuk harus kita coba menyelesaikan Pak Syamsul bagaimana jalan keluar, saya hanya sedikit menceritakan posisi seperti jalan keluar kalau kita mau cari yuridis itu tadi. Yuridis bagaimana turunan dari pada

Undang-undang Aparatur Sipil Negara itu ada PP-nya di tingkat pemerintah mengatur tentang masalah ini atau pun kita usul perlu ada Perpu dari pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara itu, harus ada bunyi yang mengatur tentang pegawai BUMN itu bisa saja kita cari supaya ini, selama ini kan payung hukumnya buat BUMN maupun tenaga kerja susah untuk melakukan memikirkan kehidupan dari pada *outsourcing* yang ada di ini. Saya rasa ini bicara tentang Aparatur Sipil Negara ini karena pegawai BUMN, BUMN yang pemerintah. Ya pemerintah mana bisa hampir sama juga dalam hal persoalan-persoalan aparatur sipil negara itu tadi.

Demikian Pak Ketua masukan saya pikir, terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Pak Ali Mahir.

**F-NASDEM (ALI MAHIR):**

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan, rekan-rekan Komisi IX dan sahabat kita tamu selamat datang Pak.**

Saya Ali Mahir dari Dapil Jateng II Kudus, Demak, Jepara, ini saya mau cerita, ada hubungannya dengan beliau-beliau ini. Daerah kita adalah daerah banyak pekerja. Dari pengalaman *outsourcing* yang terjadi di daerah kita, saya ambil satu contoh saja Kudus sedemikian banyak perusahaan, itu sudah menyengsarakan, apalagi beliau-beliau ini di BUMN ya sangat tragis Pak. Jadi di daerah kita itu seperti tenaga keamanan, Satpam misalkan atau tenaga kebersihan itu *outsourcing* itu menyedihkan. Kawan-kawan itu saya merasakan sekali berharap kredit sepeda motor misalnya tahun sekian habis kontraknya dijual dengan murah, menyakitkan sekali, apalagi Bapak-Bapak ini dari BUMN. Makanya yang ini sedikit cerita, yang saya tegaskan bahwa pasti kita mendukung perjuangan Bapak-Bapak semuanya *insha Allah*.

Lalu untuk kita bersama Bapak Pimpinan, bahwa ya sesegera mungkin, saya juga sangat menghargai Pak Ansory katakan tadi bahwa itu sesegera mungkin kita mungkin, karena Panja kemarin semakin berhenti ya dan kalau tidak salah sudah ada Satgas juga, saya sempat bertanya tadi ke sekretariat sempat berhenti, sesegera mungkin. Setidak-tidaknya karena di periode ini sudah terlalu padat, kita agendakan untuk sesegera dan saya pikir bisa lebih kompleks. Mungkin Bapak Pimpinan lebih tahu maksudnya. Saya pikir itu saja.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, selanjutnya Ibu Okky.

## **F-PPP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati, Bapak-Bapak dan Ibu ada seorang perempuan di sini dari Geber Buruh atau pekerja di BUMN.**

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Saya Okky Asokawati, Bapak dan Ibu, saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan daerah pilihan saya yaitu DKI II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

Di periode lalu saya memang tidak tergabung di dalam Panja Outsourcing ini, tapi saya cukup mendapatkan informasi apa yang direkomendasikan oleh Panja Outsourcing saat itu dan juga rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh Panja Outsourcing dan juga Satgas.

Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa DPR ini memang tidak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah kalau mereka tidak melakukan rekomendasi yang sudah kita buat. Banyak Panja-panja di parlemen ini yang merekomendasikan beberapa poin dalam beberapa isu untuk para eksekutif atau pemerintah tapi ya juga memang akhirnya juga tidak dilakukan juga, tapi untuk masalah Bapak dan Ibu ini saya dan untuk Komisi IX berharap banyak bahwa kita bisa melakukan Rapat Kerja Gabungan itu atau rapat bersama rapat gabungan itu antara Komisi IX, Komisi VI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, para direksi dari BUMN juga di sini saya punya catatannya waktu itu juga dengan Jamdatun, juga Kejaksaan Agung begitu. Kami akan berupaya dan dalam keadaan ini dalam situasi ini saya minta kepada Pimpinan agar bisa menghubungi Pimpinan DPR begitu untuk memfasilitasi agar bisa terlaksananya Rapat Kerja Gabungan tersebut, karena menurut hemat saya kadang-kadang kalau kita suatu Komisi hendak mengundang mitra dari Komisi yang lain, Komisi yang bersangkutan suka tidak kasih gitu.

Jadi dalam kesempatan ini Pimpinan mungkin Pimpinan bisa bersilaturahmi dengan Pimpinan DPR sehingga Pimpinan DPR-lah yang nantinya akan memfasilitasi untuk pertemuan itu, karena saya bisa merasakan bagaimana para perempuan, para istri terutama, karena konstituante saya itu banyak yang perempuan Bapak-Bapak. Tadi pagi juga saya baru bertemu dengan majelis ta'lim di Dapil saya terkait dengan penutupan pengajian menjelang hari ramadhan begitu ya bulan ramadhan. Memang saya bisa berempati apa yang dialami, terutama untuk para Ibu.

Jadi sekali lagi Pimpinan saya berharap semoga Pimpinan bisa melobi Pimpinan ataupun Ketua DPR agar segera memfasilitasi rapat gabungan itu. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir bathin.

***Wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Selanjutnya dari Pak Robert.

**F-GERINDRA (ROBERTH ROUW):**

Ya terima kasih.

**Pimpinan Komisi dan teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Pimpinan dan Saudara-saudara Geber BUMN dan SP Perum Bulog.**

Mendengar tadi teman-teman sampaikan, apalagi dari Pak Ansory bahwa Komisi IX periode yang lalu telah membuatkan Panja, saya kira hasilnya sangat baik dan menurut saya kita harus mendukung penuh rekomendasi yang sudah disampaikan oleh yang dihasilkan oleh Komisi IX periode yang lalu.

**Teman-teman Geber dan SP Bulog,**

Saya Robert Rouw, Fraksi Gerindra, Dapil Papua.

Ketua Umum Gerindra jelas mendukung sepenuhnya tentang penghapusan outsourcing. Dari visi misi beliau kemarin kita semua bisa melihat bahwa Gerindra akan konsen untuk menghapus perbudakan buruh melalui outsourcing. Kenapa, kita lihat bahwa *outsourcing* ini ada di BUMN. BUMN adalah pemerintah dan ini ladang korupsi. Melalui *outsourcing* ini BUMN-BUMN itu mengadakan korupsi, besar peluangnya di situ. Maka saya kira Komisi IX kita harus konsen untuk menekan pemerintah saya setuju dengan Bu Okky tadi bahwa harus melalui Pimpinan DPR RI untuk bisa kita bersama-sama dengan Komisi VI dan komisi-komisi yang terkait dengan tenaga kerja untuk bisa menghapus perbudakan ini.

Ini perbudakan yang dilakukan oleh negara, ini kan sangat..., kita semua tadi mendengar itu apa yang disampaikan oleh teman-teman dari SP Bulog ini kan tidak manusiawi ya. Katanya negara melindungi segenap tumpah darah, memberikan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mahir tadi Undang-undang Dasar kita Pasal 27, tetapi negara mengabaikan itu semua, dengan mengadakan praktek-praktek perbudakan dan ini harus kita hapus.

Jadi saya setuju kita harus berjuang dan komit untuk menghapus yang namanya perbudakan melalui *outsourcing* yang dilakukan oleh negara melalui BUMN dan ini praktek korupsi. Praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh BUMN.

Jadi sekali lagi Ketua, kami mungkin dari Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya untuk penghapusan *outsourcing* dan kami mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Okky untuk melalui Ketua Komisi untuk meminta kepada

Ketua DPR RI karena kami semua ini adalah Anggota DPR RI untuk bisa bersama-sama untuk menghapus perbudakan yang dilakukan oleh negara.

Saya kira itu terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Masih ada dari Anggota Komisi?

Pak Zul silakan.

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua, para Anggota Komisi IX dan juga kepada adik-adikku dari buruh dari Perum Bulog ya dan lainnya.**

Saya di DPR ini baru, baru periode ini. Awal saya rapat di sini dengan dari pekerja ini saya sudah katakan undang-undang itu sudah hapuskan sajarah ya, itu dari awal saya katakan. Saya juga sebelum di sini saya pimpinan perusahaan, saya juga di pemerintah dua periode, sudah masuk lagi jadi Anggota Dewan ini saya tahu persis waktu saya mimpin sebelum saya menjabat kepala daerah, saya memberhentikan karyawan kapal saya lebih kurang 1.000 lebih orang asing, kenapa, kapalnya sudah tua ya. Itu saya jaminkan uang berapa lama dia bekerja saya bayar. Ongkos pulang saya bayar ya. Selama dia menunggu kepulangan saya jamin. Begitu saya menjadi kepala daerah banyak sekali pegawai honor sudah 30 tahun, 20 tahun tidak diangkat-angkat. Saya datangi itu menteri apa itu waktu itu Pak Faisal saya katakan "Pak saya kepala daerah di sini, saya melihat pegawai honor terlalu lama kasihan" semuanya yang torek tidak dengar, jadi tukang cuci di rumah dinas. Yang kacamatanya tebal begini, pekerjaannya nyapu apa semua bertahun-tahun tidak diangkat itu menjadi pegawai negeri semua bisa pikir.

Saya minta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada waktu itu dengan hati yang tulus saya memperjuangkannya, *alhamdulillah*, sudah itu saya mimpin lagi kembali lagi, mimpin perusahaan kemarin, pegawai saya saya tanya satu per satu, kamu sudah berapa tahun kerja, baru 1 tahun Pak, kamu berapa, 3 tahun, berapa gaji kamu saya panggil Kepala Keuangan naikkan gajinya.

Nah sekarang saya di DPR, saya sangat sedih mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik ini. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya Pak ya. Saya H. Zulfikar Ahmad dari Partai Demokrat, hidup Demokrat! Dapil Jambi ya. Ingat kami di sini berapa orang kita Demokrat, banyak juga ini.

Nah oleh sebab itu, pernah perusahaan Jepang dengan Korea datang ke sini, direksinya saya marah-marahin, saya katakan anda ini bangsa Indonesia saya bilang, kuli dari pada Jepang ini juga semua ini, kenapa ini buruh-buruh ini dibiarkan

seperti itu, tidak ada perjuangan, tidak diperjuangkan nasib mereka. Saya katakan di sini. Termasuk Pertamina direksi ini juga saya katakan. Kenapa tidak punya hati nurani gitu, ini bukan Hanura ya hati nurani ini. Ini hati nuraninya Demokrat ini. Saya katakan itu. Saya tegas. Jadi melihat ada di beganti terus perjuangan, berdiri di depan, kami hadapi dengan Ketua, minta gaji naik, minta *outsourcing* dihapuskan.

Ketua, hari ini kita nekad, kita panggil semua direksi-direksi nanti ya, adik-adik harus datang. Jadi kita ketemuan bersama-sama, baru selesai. Direksi itu juga diangkat, bukan nenek moyangnya itu punya perusahaan ya itu. Jadi saya minta inikan, kita bersama-sama berjuang.

Jadi apa yang dibilang tadi ini ayo kita berdemo gitu, tapi jangan kita di depan, kita belakang saja ya. Tadi saya dengar adik anu mau bakar diri, jangan ya, jadi sabar. Jadi kalau kita sabar ini supaya kawan-kawan di Komisi IX betul-betul jangan ngomong saja kita menghapuskan itu, tapi betul-betul kita laksanakan ya, apalagi sudah ada rekomendasi Tahun 2013, padahal saya tidak tahu itu dulu itu, karena saya orang baru. 2014 ya? 2014 sudah penghujung ya, nah itu. Jadi kita jangan inilah, pokoknya yang benar kita perjuangkan terus, itu artinya kita menjadi wakil rakyat di Indonesia ini, khususnya saya dari Jambi, ada yang dari Jambi di sini? Jambil soalnya aman-aman saja ya. Gubernurnya sudah saya katakan itu beliau ini dulu kan wakil gubernur, saya katakan gubernurnya ya kalau UMR ini di Jawa sekian, kita naikkan saja sudah, saya juga punya perusahaan. Kalau gara-gara itu bangkrut, ya bangkrutlah, yang penting masyarakat yang kerja itu puas hatinya gitu.

Saya rasa itu Ketua, salah dan kurangnya pembicaraan saya, saya minta maaf.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ibu Siti.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH,PSI):**

Tambahan saja Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX serta para undangan yang hadir hari ini dari Geber BUMN.**

Mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian bahwa di Komisi IX memang pernah terjadi kita rapat gabungan ya. Pimpinan kita pernah terjadi mungkin Pak Anshori dan rekan-rekan yang di periode sebelumnya itu di Komisi IX, maka rapat itu pernah kita lakukan rapat gabungan, tetapi memang agak sulit, sangat sulit, menterinya sulit datang, karena menterinya bukan dari Komisi IX,



mitra kerjanya bukan Komisi IX. Sampai-sampai Pimpinan yang dahulu juga pernah turun ke jalanan bersama-sama rekan-rekan sekalian untuk mendesak dan meminta secara paksa agar menteri kita BUMN yang dulu hadir di rapat kita, karena memang setelah ditelusuri dan setelah kita amati ternyata hasil dari rekomendasi Komisi IX dalam Rapat Panja maupun rapat itu dengan Geber BUMN itu tidak dijalankan dengan baik, bahkan bukan dengan baik tapi memang tidak dijalankan sama sekali. Nah itu sangat miris sekali buat kami semua.

Nah ini Pimpinan memang harus cari terobosan baru, terobosan yang mungkin bagaimana caranya mungkin ada satu tadi ide bahwa kita harus segera menghadap ke Pimpinan DPR minta dukungan sepenuhnya kepada Pimpinan DPR agar kita panggil menteri itu yang memang bukan menteri mitra Komisi IX itu kesulitannya sangat besar dan mudah-mudahan menteri kita yang BUMN sekarang ini kan perempuan ya, Ibu Rini ya, nah mudah-mudahan Ibu Rini ini bisa lebih kooperatif dengan kita semua mudah-mudahan ya dan kita minta dorongan juga dari Komisi VI Pimpinan Komisi VI agar mereka dengan secara terbuka maupun mendorong secara penuh agar menterinya boleh bergabung dengan kita untuk membicarakan masalah *outsourcing* di BUMN ini, karena memang banyak masalah. Di BUMN saja banyak masalah apalagi di luar BUMN.

Nah Pimpinan segera kita saya sangat mendukung sekali, karena kebetulan di daerah saya Dapil Tasik dan Garut kebetulan saja memang belum ada gejolak yang luar biasa karena memang adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pusat dalam pengelolaan *outsourcing* ini, sehingga gejolak-gejolak seperti yang dirasakan oleh Geber BUMN ini yang di daerah lain tidak terjadi di tempat kami, tetapi Komisi IX wajib untuk menangani berbagai macam masalah yang kaitannya dengan *outsourcing* BUMN di seluruh Indonesia dan memang kasusnya sangat urgen Pimpinan, mari kita sama-sama teman-teman Komisi IX untuk bisa bergabung dan bagaimana rapat-rapat gabungan ini bisa segera dilaksanakan di Komisi IX. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Pimpinan segera kita merapat ke Pimpinan DPR agar rapat gabungan ini bisa terlaksana dengan baik.

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Masih ada di Anggota?

Cukup?

Sekarang dari meja Pimpinan kami persilakan Pak Dede.

**KETUA KOMISI IX (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST./ F-PD):**

Terima kasih Pak.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**Selamat siang.**

**Salam sejahtera buat kita semua.**

Saya tadi tertarik ini Pak Zul bilang katanya suruh kawan-kawan nanti demo, tapi nanti Pak Zul yang siapin nasi bungkusnya.

Baik begini, pertama tentunya kawan-kawan sudah mengetahui sejak awal kita berkumpul bertemu dan kita membahas masalah soal Rakergab. Di Komisi IX hampir semua Anggota ini sudah sepakat kita untuk melaksanakan kebijakan terdahulu, termasuk juga Satgas, hanya saya cek Satgas itu sudah berakhir Desember tanggal 30 Desember. Artinya Januari semenjak kita masuk ini Satgas ini sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawabannya untuk Satgas ya.

Lalu yang kedua, bahwa di dalam Undang-undang BUMN ini salah satunya ada ASN, ada masalah ASN. Jadi kami sejak beberapa bulan yang lalu sebelum kawan-kawan ber-SMS terus kepada kami, kita juga sudah mendengar semua curhatan-curhatan kawan-kawan Indofarma, PLN dan lain-lainnya dan kita sudah meminta berkali-kali kepada Pimpinan DPR untuk melaksanakan Rapat Kerja Gabungan, hanya kemarin terhambat dengan adanya Asia Afrika dan sebagainya.

Nah kemarin mungkin kawan-kawan Geber BUMN sudah ketemu juga dengan Pak Fadli Zon dan sudah sepakat untuk melaksanakannya dalam waktu dekat. Kami sudah berkirin surat lagi kepada Pimpinan DPR mudah-mudahan mungkin kalau Minggu ini tidak ngejar ya, karena waktunya tinggal 1 hari, mudah-mudahan Minggu depan kita akan kejar supaya kita bisa Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI dengan Komisi IX ya ada tambahan sebetulnya yaitu Komisi II ini terkait dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, tapi itu bisa kita lakukan setelah kita mendengar dari Menteri BUMN. Nah dengan Menteri BUMN nanti tentunya bersama dengan Dirut-dirut dari pada BUMN-BUMN itu.

Ada sesuatu yang sangat miris sekali, ini sangat penting saya sampaikan ketika saya naik Garuda, saya melihat itu Saudara-saudara kita yang bekerja, terutama yang di *Ground Crew*-nya itu yang memeriksa ban, yang memeriksa bensinya dan sebagainya, saya tanya rata-rata *outsourcing*. Jadi memang ternyata pekerjaan-pekerjaan yang inti itu dilakukan oleh *outsourcing*, betul ya?

Lalu saya melihat kemarin juga bagaimana Saudara-saudara kita yang memasang gardu-gardu listrik sutet, itu saya tanya juga itu rata-rata *outsourcing*. Jadi kalau ada sesuatu mereka ini boleh dikatakan ya mohon maaf yang namanya *outsourcing* itu kan tidak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dan bisa sewaktu-waktu dipindahkan. Artinya ini juga akan mengancam yang disebut sebagai tulang punggung dari pada infrastruktur bangsa, termasuk tadi ada pesawat, KAI ya, telepon dan sebagainya jika kondisinya adalah kondisi yang bukan karyawan. Bukan berarti loyalitas itu dipertanyakan tetapi kondisinya adalah seperti itu yang saya rasa ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah.

Oleh karena itu, saya sangat sepakat dengan pendapat kawan-kawan, apalagi tadi Pak Ali Taher sudah mengatakan bawa-bawa nama macam ya, tidak ada hubungannya sebetulnya Pak, tapi yang jelas bahwa kesepakatan kita ini harus kita laksanakan tentu dengan cara main yang baik, aturan main yang baik. Artinya saya

tidak menyarankan demo besar-besaran seperti Pak Ansory, tetapi kami di Pimpinan pasti besok segera meminta kepada Pimpinan DPR, meminta kepada Pimpinan Komisi VI dan kalau perlu jika besok-besok ternyata Menteri BUMN masih punya masalah juga tidak mau datang, maka kita pun juga akan menggunakan cara menjemput secara paksa ya sebagai Pimpinan. Secara pakasanya bukan dengan cara Polisi tentunya ya pasti kita akan datang. Kenapa, karena ini adalah hak bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya ya.

Yang terakhir tentunya tolong kita sama-sama memberikan *support* politik kawan-kawan pun kepada Komisi VI ya supaya, karena ketika saya sempat bertanya kepada Pimpinan Komisi VI, memang kelihatannya masih belum 100% itu seperti kaya menganggap bahwa ini penting. Padahal dulu kami sudah pernah mengancam juga kita menolak pemberian tambahan modal negara untuk BUMN jika tidak bisa menyelesaikan masalah *outsourcing* ya, ternyata itu berjalan juga.

Nah saya tidak tahu apakah tadi Pak Ansori mengatakan kalau perlu kita tolak anggaran Kemenaker, saya bilang jangan anggaran Kemenaker-nya yang kita tolak, APBN-nya yang kita tolak, karena kalau anggaran Kemenaker, Kemenaker hanya melaksanakan Undang-undang Tenaga Kerja, sementara BUMN ini yang penting. Jadi ini adalah opsi-opsi langkah-langkah yang tentu akan kita lakukan bersama.

Jadi saya mohon juga kawan-kawan agar ikut memantau perkembangan di Komisi VI terkait dengan Rapat Kerja Gabungan ini ya supaya SMS-nya juga kepada kawan-kawan di Komisi VI juga ya. Kalau kita yang jelas Minggu depan kita upayakan jadwal kita masuk Rapat Kerja Gabungan segera setelah Pimpinan DPR menyetujui. Jadi teruskan perjuangan, ini hari Kebangkitan Nasional, hari Kebangkitan Nasional itu menghindari perbudakan salah satunya dan jangan lagi ada perbudakan di dalam *outsourcing*.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

**Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,**

Semua Komisi IX yang bicara tadi memberikan dukungan, tidak ada yang memberikan pertanyaan, tapi dukungan dengan ekspresi masing-masing, semua fraksi memberikan dukungan, apa yang telah Bapak dan Ibu sampaikan. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan dua kesimpulan dari pertemuan ini nanti untuk bisa di-*follow up*-i oleh Komisi IX.

Yang pertama, Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti rekomendasi Panja Outsourcing BUMN yang telah dihasilkan Anggota Komisi IX DPR RI masa bakti 2009-2014. Artinya ini akan dilanjutkan, akan dihidupkan kembali oleh Komisi IX periode sekarang ya sebagai tindak lanjut dari perjuangan kawan-kawan periode sebelumnya.

Yang kedua, Komisi IX DPR RI meminta Pimpinan DPR RI untuk melaksanakan Rakergab antara Komisi IX DPR RI dan Komisi VI DPR RI dengan mengundang Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi BUMN pada Masa Sidang IV Tahun Persidangan 2014-2015.

Jadi kita berharap dalam Rakergab itu selain Menteri BUMN hadir, Menteri Tenaga Kerja juga hadir, hadir juga Direksi BUMN yang seperti yang termasuk Direksi Bulog maka kita undang untuk kita minta penjelasan-penjelasan kenapa mereka begitu keras kepala untuk menindaklanjuti rekomendasi pada periode yang lalu.

Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian kesimpulan kita pada hari ini. Saya kira semuanya.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Sedikit saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Yang Nomor 1 itu disebut saja biar lebih jelas Ibu Rapat Komisi IX periode lalu tanggal 22 Oktober 2014, disebutin tanggalnya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, coba disempurnakan.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Supaya lebih dikuatkan gitu.  
Terima kasih, itu saja.

**GEBER BUMN:**

Pimpinan boleh menambahkan pendapat?

**KETUA RAPAT:**

Siapa yang tadi?  
Oh ya silakan.

**GEBER BUMN:**

Baik.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

Terima kasih Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya.

**Yang saya hormati kawan-kawan Anggota DPR dari berbagai macam fraksi... serta rekan-rekan Buruh Berjuang dari Geber BUMN maupun dari Bulog.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin nanti ini yang kedua setelah... Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas berbagai macam *support* simpati dari kawan-kawan DPR, tapi saya harapkan ini bisa lebih konkrit. Ketika sekarang posisi kita masih berbicara BUMN sudah melakukan aksi juga, kenapa saya bilang seperti itu, yang pertama soal rekrutmen. Ketika kawan-kawan sudah dibuang di-PHK BUMN membuka lowongan kerja untuk pekerjaan sejenis untuk staf juga sejenis dengan latar belakang pendidikan yang sama, itu terjadi di PLN, itu terjadi di KS, ini baru yang saya dapat ini Pak, saya belum tahu persis ada di mana lagi, di Bulog juga.

Artinya ketika kami sekarang dengan Bapak pada posisi persidangan masih seperti ini, rekrutmen sudah berlangsung. Saya khawatir ketika rekomendasi akan dilaksanakan mereka bilang posisi kita penuh, bagaimana kelanjutannya? Itu yang pertama.

Kemudian terkait dengan yang kedua ya saya *respect* kepada... dan Pimpinan yang lainnya bahwa memang sudah ada itikad untuk penjadwalan di tanggal 2 Februari dan 27 April kalau tidak salah yang saya dapatkan jadwalnya seperti itu dan besok kami tunggu Pak. Sebetulnya kami lebih menginginkan di poin 2 itu karena tadi juga sudah ada katakanlah yang di depan mungkin yang seperti itu mungkin bolehlah kalau misalkan memang sudah terjadi pembicaraan dengan Ketua atau pun Pimpinan DPR lainnya dan juga kemarin... kami juga sudah... sudah bertemu dengan Pak Fadli Zon dan beliau juga sudah bilang... sebetulnya *respect* dari pada teman-teman di Komisi IX. Ketika surat itu sampai mungkin sudah selesai. Kemarin juga saya diminta untuk memberikan semacam kaya kronologisnya dari A sampai Z sudah saya berikan dan ini akan diteruskan juga ke Pimpinan DPR yang lain dengan Pak Fachri dengan Pak Agus Hermanto itu omongnya seperti itu.

Jadi artinya kalau memang ini bisa menjadi kebulatan tekad semuanya, saya pikir mungkin tidak ada yang keberatan, apalagi tadi disebutkan oleh Pak Dede kita bisa menggunakan mekanisme jemput kan... dengan cara yang lebih baik mungkin seperti itu, nah saya dukung bagaimana kalau seandainya di poin kedua itu juga ditegaskan soal membuka waktunya misalkan seperti itu biar kita sama-sama memantaukan kabarnya kita harus memantau...

Kemudian yang ketiga, kalau memang memungkinkan saya harapkan bagaimana caranya agar rekrutasi tadi itu bisa tidak menjadi kendala kami di kemudian hari. Apakah mungkin ada sebuah desakan, ada sebuah rekomendasi dari sidang ini untuk bersurat kepada Menteri BUMN untuk menghentikan itu rekrutasi atau paling tidak prioritaskan soal teman-teman yang sudah di-PHK sepihak ini. Jadi

tetap dialokasikan gitu loh Pak. Kalau memang tidak bisa dihentikan tetap alokasikan soal kawan-kawan penempatan besok ya. Kami khawatir itu menjadi menutup akses...

Kemudian yang terakhir, bukan saya menggurui tapi paling tidak ada sebuah yang mungkin bisa diangkat saya tegaskan saja saya mungkin kawan-kawan dari, saya rasa mungkin KIH masih di sini mohon maaf maksud dari Partai Nasdem mungkin ada di sini. Saya harapkan bisa diwujudkan soal janji dari pada Presiden Jokowi terkait dengan pemberdayaan buruh... di situ. Kerja layaknya itu yang saya tanya sekarang ini. Kenapa saya bilang, karena *outsourcing* bagi kami bukan sebuah pekerjaany layak. ILO itu sudah menegaskan bahwa mengukur sebuah pekerjaan layak ada 4 hal dan semuanya tidak ada di *outsourcing*. Terkait dengan hak dasar upah, terkait dengan hak pengembangan diri, terkait dengan hak kesetaraan, itu sama tidak ada semuanya di *outsourcing*, jadi *outsourcing* bukan pekerjaan layak. Makanya kami harapkan dari mungkin... Partai Nasdem yang mungkin juga bisa mendesak kepada pemerintahan juga kepada DPR pada umumnya ya minta tolong untuk kerja layak ini bisa ditekankan karena *outsourcing* bukan...

Yang terakhir, ini soal mohon maaf sekali lagi saya mencoba untuk menggali sisi humanis tadi sudah disebutkan oleh Kang Dede, bahwa memang benar adanya sekarang juga masih siap orangnya untuk menjual ginjal. Ini memang luar biasa teman-teman ini sudah dalam posisi yang titik nadir untuk soal... ekonomi. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya terima kasih atas segala macam simpati dan kami harapkan benar-benar bisa empati kalau Pak... kita demo untuk sekedar nasi bungkus, harapan saya bisa... langsung Pak, kami undang Bapak untuk bisa ke rumahnya Bapak lihat gitu loh bahwa memang kondisi kita itu dalam posisi yang sudah pada titik nadir, 2 tahun kami berjuang dalam Geber BUMN dan sekarang belum ada hasilnya. Sebelum Geber BUMN itu lebih parah lagi, kita sudah 3 sampai 4 tahun sebelumnya memperjuangkan soal *outsourcing* ini.

Nah harapan saya di kepemimpinan yang baru di dalam Komisi ini dan juga Anggota-anggota Dewan yang baru tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan DPR di periode sebelumnya dan saya harapkan Rakergab bisa atau boleh ditentukan waktunya supaya kita bersama.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**GEBER BUMN:**

Menutup Pak, Pak Pimpinan, maaf, ya menutup.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum kita anu kita sahkan dulu sebelum ditutup ya.

**GEBER BUMN:**

Ini menyampaikan satu hal tentang.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi masih?

**GEBER BUMN:**

Ya, tadi ada pertimbangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara itu menjadi salah satu solusi, tapi saya rasa itu bukan, justru itu tidak memperbaiki justru nanti sama saja dengan kondisi sekarang Pak kalau itu masuk di dalam kriteria P3K tadi. Artinya apa, mereka akan dikontrak-dikontrak yang seperti sekarang, ini yang satu masalah mereka itu menjadi tidak tenang, karena setiap tahun mereka harus bersandiwara dengan atasannya langsung ya tidak tahu dengan cara bagaimana supaya bisa diperpanjang kontrak dan ini membuat kegelisahan mereka..., saya rasa Undang-undang Aparatur Sipil Negara kita pilih yang langsung ke pegawai negeri sipilnya saja Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira masukan ya, masih ada silakan?

Singkat.

Coba tukar tempat dulu yang di depan itu ya.

**GEBER BUMN:**

Terima kasih.

Perkenalkan saya Murdiso dari... PLN Jawa Tengah dan DIY. Saya mewakili teman-teman dari Jawa Tengah dan DIY. Saya dari Purwokerto, mungkin Mba Amalia saya dari... Mba Amalia ya.

Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pimpinan kami Pimpinan Geber tadi ya soal rekrutmen bagi karyawan-karyawan yang baru, karena kami kebetulan tanggal 15 kemarin juga mendorong gerakan atau perjuangan Geber ini lewat pertemuan atau audiensi dengan GM PLN di Jawa Tengah dan DIY dan hasil dari pada audiensi tersebut bahwa untuk PLN memang tidak akan ada perekrutan dari *outsourcing* PLN, kecuali ada keputusan dari PLN pusat, itu seperti itu intinya dan kemudian PLN hanya mendorong untuk ke depan akan dilaksanakan dengan kontrak 5 tahun yang menurut kami ini justru akan lebih membuat sengsara bagi kami, karena sama saja antara kontrak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun semuanya masih *outsourcing*.

PLN masih menganulir adanya keputusan APELIN (Asosiasi Perusahaan Listrik Nasional) yang dijadikan sebagai patokan untuk tetap mengadakan *outsourcing* itu. Kemudian kami juga meminta audiensi atau meminta pendapat dari

Bagian Keuangan di PLN Jawa Tengah dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya anggaran kalau di anggaran PLN untuk mengangkat *outsourcing* itu sebenarnya tidak akan mengubah anggaran PLN, artinya justru kalau anggaran PLN itu diberikan langsung kepada karyawan *outsourcing* tanpa melalui vendor itu akan lebih efisien, itu menurut Bagian Keuangan dari PLN Jawa Tengah seperti itu.

Kemudian yang terakhir kaitannya dengan yang disampaikan Pak... soal penghentian perekrutan karyawan baru tadi terkait dengan yang terjadi di Jawa Tengah bahwa untuk 1 bulan ke depan kemungkinan kontrak administrasi itu kemarin sudah dibahas akan diadakan atau akan dihapus, padahal pekerjaan administrasi baik administrasi pelayan pelanggan maupun administrasi teknik dan lain sebagainya itu masih ada di PLN, tapi kontraknya dengan *outsourcing* itu dihapus dan secara otomatis akan digantikan dengan karyawan organik yang baru. Nah ini yang kemudian menjadikan kendala bagi teman-teman soal penghapusan itu karena mereka teman-teman yang ada di Divisi Administrasi itu kemudian akan dipindahkan kontraknya kepada kontrak-kontrak yang sesuai dengan nota pemeriksaan, seperti dimasukkan ke kontrak *driver*, kontrak satpam dan kontrak *cleaning service*, itu yang terjadi di Jawa Tengah seperti itu.

Nah ini saya mohon ini sebagai bahan masukan untuk Bapak-bapak di DPR ini sebagai bahan acuan untuk segera menuntaskan permasalahan *outsourcing* di PLN khususnya.

Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya.

***Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Saya kira beberapa masukan tadi, cuma perlu kami sampaikan bahwa Komisi IX tidak dalam posisi untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada di PLN dan lain sebagainya. Ini bisa kita selesaikan nanti dalam Rapat Kerja Gabungan. Jadi kalau sekarang rapat ini merekomendasikan kepada PLN untuk menghentikan itu, tentu tidak dalam posisi Komisi IX seperti itu.

Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendorong secepatnya Rakergab, sehingga kita bisa minta penjelasan dari Direksi BUMN termasuk PLN atau kepada Menteri BUMN untuk mengambil langkah-langkah yang menguntungkan kawan-kawan yang selama ini berposisi sebagai *outsourcing*. Jadi Rakergab itulah nanti mengambil kesimpulan yang mengikat mereka ya, karena ada Komisi IX di situ, ada Komisi VI di situ, ada menteri-menteri dan ada BUMN yang bersangkutan. Kita di sini tidak bisa mengambil kesimpulan yang sifatnya sepihak, itu menyalahi aturan di DPR.

Yang kedua, soal waktu. Waktu seandainya ini di bawah otoritas Komisi IX, itu bisa kita tentukan, tapi kita perlu koordinasi dengan Pimpinan DPR soal waktunya, kemudian juga dengan Pimpinan Komisi VI untuk mengatur waktu yang pas sehingga semuanya bisa hadir pada Rakergab tersebut. Oleh karena itu tidak dimungkinkan kita menentukan tanggal sekarang, karena Pimpinan akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPR agar segera memprogramkan Rakergab,



karena kita berharap Rakergab ini nanti dipimpin oleh Pimpinan DPR ya, sehingga daya simpulnya, daya dorongnya itu lebih kuat.

Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, ya ini sudah selambat-lambatnya masa sidang ini. Masa sidang ini hanya 30 hari sekian, mudah-mudahan kami mohon Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan kami minta nanti pada saat Rakergab ini kami akan undang secara resmi untuk hadir menyaksikan rapat yang akan diadakan oleh Komisi IX dan juga oleh Komisi VI.

Saya kira demikian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini, mudah-mudahan perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak, perjuangan DPR juga bisa kita wujudkan pada masa-masa secepatnya.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP)**

**Jakarta, 20 Mei 2015**  
**Ketua Rapat**

**Ttd**

**H. Syamsul Bachri, M.Sc**  
**A-312**